

Evaluasi Unsur Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMPN 1 Maospati Kabupaten Magetan

Fita Mulyaningrum^{a*}, Hartini Prasetyaning Pawestri^a, Zainudin^a

^a Program Studi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 13-05-2024

Revised : 12-06-2024

Accepted : 17-06-2024

Keywords: Education Institutions, Government Internal Control System, Management of PIP funds

Kata Kunci: Instansi Pendidikan, Pengelolaan dana PIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Corresponding Author:

mulyaningrumfita@gmail.com,

tiningharun@gmail.com,

zponcolimo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze and evaluate the elements of Government Internal Control (SPIP) according to PP No. 60 of 2008 in the management of PIP funds at SMPN 1 Maospati. The main informants in the study were 3 people and additional informants were 6 people. The research method used is descriptive qualitative with data collection methods from interviews with informants, observation and documentation. The results of this study indicate that the internal control elements of PIP fund management have been running well according to the regulations set by the government, but there are some inputs on control activities. In controlling activities, the school should hold HR coaching for PIP managers and make benchmarks to assess the performance of PIP managers so that PIP management in this school can run optimally.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi unsur Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut PP No. 60 tahun 2008 dalam pengelolaan dana PIP di SMPN 1 Maospati. Informan utama dalam penelitian sebanyak 3 orang dan informan tambahan sebanyak 6 orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dari wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur pengendalian internal pengelolaan dana PIP sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah, namun ada beberapa masukan pada kegiatan pengendalian. Pada kegiatan pengendalian sebaiknya sekolah mengadakan pembinaan SDM untuk pengelola PIP dan membuat tolak ukur untuk menilai kinerja pengelola PIP agar pengelolaan PIP di sekolah ini bisa berjalan maksimal.

PENDAHULUAN

Dana dalam pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan kompetitif, artinya siswa memerlukan biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah. Bagi siswa yang keterbatasan ekonomi tentunya biaya-biaya yang harus dikeluarkan tersebut menjadi beban, yang mengakibatkan banyak anak-anak yang putus sekolah karena biaya yang mahal.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas (76%) orang tua menyatakan bahwa penyebab utama anak mereka putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. 67,0% lainnya menyatakan tidak mampu membayar biaya sekolah dan sisanya sebesar 8,7% harus mencari nafkah. Sedangkan pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan wajib belajar selama dua belas tahun, baik di desa maupun di kota agar anak-anak bisa mendapatkan haknya sebagai pelajar. Peraturan ini dikeluarkan menggunakan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014 (RPJMN).

Dalam upaya mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan membantu siswa yang tidak mampu dalam hal ekonomi pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD) nomor 10 tahun 2020 mengenai Program Indonesia Pintar yang kemudian dalam pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (PERSEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK) nomor 14 tahun 2022. Program Indonesia Pintar ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Kemudian siswa yang mendapat PIP ini akan mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas penerima.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana PIP beroperasi dengan efektif dan efisien, serta untuk mencegah potensi terjadinya penyelewengan dana, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengevaluasi pengelolaan dana PIP pengendalian internal yang diterapkan di sekolah. Dengan adanya evaluasi tersebut, akan memberikan dukungan esensial bagi kebijakan manajemen. Hal ini memungkinkan manajemen untuk melakukan perencanaan program dengan lebih cermat dan efisien, serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan.

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah (annisa, 2020)

Maka dari itu peneliti ingin melakukan evaluasi unsur pengendalian internal dalam

pengelolaan dana PIP yang ada di SMPN 1 Maospati. Dana PIP ini merupakan dana yang diberikan kepada siswa yang tidak mampu secara ekonomi agar bisa sekolah. Dengan dilakukannya evaluasi ini diharapkan bisa menjamin kecepatan, ketepatan dan keakuratan informasi dalam mengelola dana PIP yang dilakukan SMPN 1 Maospati.

Alasan memilih objek di SMPN 1 Maospati karena ingin mengetahui apakah unsur pengendalian internal dalam pengelolaan dana pip di sekolah tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Peneliti juga ingin mengetahui apakah dana PIP ini sudah tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya atau belum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sebenarnya dari objek yang sedang diteliti. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam mengenai suatu isu dengan mengkaji setiap aspek permasalahan yang dianalisis. Hasil dari penelitian kualitatif ini disimpulkan secara deskriptif agar memudahkan peneliti dalam menyimpulkan data lapangan.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan informasi dalam bentuk gambar kemudian dideskripsikan sesuai dengan data dokumentasi yang ada. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara dengan informan terpilih. Wawancara dilakukan secara langsung di lapangan saat sekolah melakukan kegiatan aktif. Data dikumpulkan dengan catatan dan dokumentasi berupa gambar dan rekaman suara.

Tabel 1. Daftar Informan

NO	INFORMAN	JABATAN
1.	S	Kepala Sekolah
2.	SW	Waka Kesiswaan
3.	TY	Operator Dapodik
4.	A	Siswa Penerima PIP kelas 7
5.	N	Siswa Penerima PIP kelas 7
6.	J	Siswa Penerima PIP kelas 7
7.	T	Siswa Penerima PIP kelas 8
8.	A	Siswa Penerima PIP kelas 8
9.	E	Siswa Penerima PIP kelas 8

*Sumber: Data diolah peneliti 2024 *Nama informan disamarkan*

Informan dalam penelitian ini merupakan informan terpilih yang merupakan orang yang berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti yaitu SMPN 1 Maospati. Informan terpilih berjumlah 10 orang dengan kriteria 3 sebagai informan utama dan 6 sebagai informan tambahan. Kriteria pemilihan informan utama antara lain 1 orang kepala sekolah sebagai pengawas dan penanggungjawab pengelolaan PIP di SMPN 1 Maospati, 1 orang waka kesiswaan sebagai koordinator pengelolaan PIP di SMPN 1 Maospati, 1 orang operator dapodik sebagai orang yang memasukkan dan mengurus data-data siswa penerima PIP pada dapodik. Untuk kriteria informan tambahan yaitu 3 siswa kelas 7 penerima bantuan PIP dan 3 siswa kelas 8 penerima bantuan PIP. Informan yang dipilih mempunyai pengetahuan yang cukup dan mampu memberikan penjelasan terhadap objek yang diteliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

SMPN 1 Maospati merupakan Sekolah Menengah Pertama yang berdiri sejak tahun 1957. Lokasi SMP ini berada di kecamatan Maospati, kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di kabupaten Magetan. Ada banyak kegiatan yang dimiliki sekolah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, selain itu banyak program unggulan yang dimiliki sekolah ini yang sesuai dengan visinya yaitu “sekolah unggul, berkarakter, multiliterasi dan berkebudayaan lingkungan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai unsur pengendalian internal dalam pengelolaan dana PIP yang ada di sekolah ini. Dana PIP ini merupakan program dari pemerintah yang dijalankan di sekolah ini untuk membantu siswa yang kurang mampu. Tolak ukur yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 14 tahun 2022 mengenai Program Indonesia Pintar.

Prinsip Penyelenggaraan PIP

Dalam penyelenggaraannya, pihak sekolah sudah menyebarkan informasi secara jelas dan terbuka kepada seluruh siswa mengenai adanya dana bantuan PIP. Bahkan dalam penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah mencantumkan program ini dalam brosur sebagai jalur afirmasi yang bisa ditempuh untuk siswa baru yang layak mendapat bantuan. Bisa dilihat bahwa pihak sekolah sudah transparan dalam menyebarkan informasi mengenai bantuan PIP ini, hal ini menandakan pihak sekolah sudah mematuhi salah satu prinsip penyelenggaraan PIP yaitu “transparansi”.

Setelah informasi mengenai program ini disebarluaskan, pihak sekolah tetap mengadakan seleksi untuk mengetahui seberapa penting siswa tersebut mendapat bantuan. Seleksi tersebut berupa adanya surat keterangan dari desa dan tidak ke rumah

yang bersifat kekeluargaan. Bisa dilihat bahwa pihak sekolah telah efektif dan efisien dalam menentukan siapa yang berhak diusulkan untuk mendapat bantuan PIP agar dana bantuan ini bermanfaat dan patut diterima siswa yang membutuhkan. Hal ini menandakan pihak sekolah sudah mematuhi prinsip penyelenggaraan PIP yaitu “efektif, efisien, manfaat dan kepatutan”

Data-data yang telah dikumpulkan siswa bisa dipastikan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas karena data tersebut berupa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan desa. Bisa dilihat bahwa sekolah bisa mempertanggungjawabkan data-data siswa, hal ini menandakan pihak sekolah sudah mematuhi prinsip penyelenggaraan PIP yaitu “akuntabilitas”.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip penyelenggaraan PIP di SMPN 1 Maospati sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, yaitu efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan manfaat.

Tujuan PIP

Tujuan dilaksanakannya PIP di sekolah ini yaitu membantu siswa kurang mampu untuk membiayai keperluan sekolah siswa dan membantu siswa agar tetap lanjut sekolah. Kesimpulannya adalah tujuan dilaksanakannya PIP di sekolah ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah yaitu meningkatkan akses layanan pendidikan, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, menarik anak usia sekolah putus sekolah.

Sasaran Penerima PIP

Sasaran penerima PIP di sekolah ini adalah anak tidak mampu, anak yatim piatu, ada anak usulan dari desa saat SD belum mendapat bantuan, kemudian diusulkan saat SMP. Memang kebanyakan di sekolah ini siswa yang mendapat bantuan sudah dapat mulai dari SD. Kesimpulannya adalah sasaran penerima PIP di sekolah ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah yaitu peserta didik berstatus yatim piatu, peserta didik dari keluarga miskin, peserta didik yang berpotensi putus sekolah.

Besaran dan Manfaat PIP

Besaran dana yang diterima siswa yaitu untuk kelas 7 semester gasal sebesar Rp. 375.000, kemudian di semester berikutnya siswa akan menerima dana bantuan sebesar Rp. 750.000. Dana bantuan ini digunakan siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli seragam, buku, alat tulis dan keperluan sekolah lainnya.

Kesimpulannya adalah besaran dan manfaat dana PIP untuk siswa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu mendapat bantuan sebesar Rp. 375.000 untuk kelas 7 semester gasal dan untuk semester berikutnya mendapat bantuan sebesar Rp. 750.000. dan untuk manfaat bantuan ini untuk membiayai kebutuhan sekolah siswa.

Mekanisme Penetapan PIP

Untuk penetapan PIP, pihak sekolah hanya mengusulkan dengan tahapan sekolah mengumpulkan data-data siswa penerima PIP, kemudian melakukan verifikasi data, setelah itu sekolah mengusulkan lewat dapodik siswa-siswa yang rentan miskin atau miskin, setelah itu pada server ditandai bahwa siswa tersebut layak mendapat bantuan dan ditandai alasan layaknya. Untuk siswa yang sebelumnya sudah mendapat bantuan, pihak sekolah tinggal memasukkan nomornya saja. Setelah itu untuk siapa saja yang berhasil mendapat bantuan yang menetapkan adalah pemerintah.

Kesimpulannya adalah untuk mekanisme penetapan, pihak sekolah sudah menjalankan semua prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Mekanisme Penyaluran PIP

Mekanisme penyaluran PIP yang mengatur adalah pemerintah, pihak sekolah hanya mengusulkan. Akan muncul nama-nama siswa yang mendapat bantuan PIP melalui portal PIP untuk melakukan aktivasi ke bank yang ditunjuk. Setelah aktivasi maka dana akan dicairkan melalui rekening bank yang sudah diaktivasi tersebut.

Kesimpulannya adalah penyaluran dana PIP adalah kebijakan pemerintah yang prosedurnya sudah tertulis dalam PERSEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK nomor 14 tahun 2022.

Mekanisme Penarikan Dana PIP

Sekolah melakukan aktivasi ke bank sesuai dengan surat edaran yang turun, kemudian pihak bank akan memastikan lagi siapa yang harus dihubungi untuk pencairan. Setelah itu pihak sekolah memanggil siswa yang bersangkutan dan mencocokkan antara buku tabungan yang dimiliki siswa dan nomor rekening dalam surat edaran. Kemudian orang tua dipanggil ke sekolah untuk diberi arahan. Setelah itu orang tua dan siswa bisa langsung ke bank dengan membawa persyaratan antara lain surat keterangan aktif dari sekolah, akta kelahiran siswa, KK dan KTP orang tua. Untuk syarat penarikannya, dana dalam tabungan di tarik semua dulu atau di nol kan agar menandakan bahwa siswa sudah melakukan penarikan, kemudian siswa bisa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam rekening.

Kesimpulannya adalah untuk mekanisme penarikan dana PIP yang dilakukan disekolah ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Kesimpulan dari keseluruhan pengelolaan PIP di SMPN 1 Maospati sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 14 tahun 2022. Dan bisa dikatakan pengelolaan PIP di sekolah ini baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Muqti

& Haqiqi, 2019), (Erdial, 2022), (Fakih Hilmi Al Huda & Zainal Abidin, 2023) dalam hal keefektifan penggunaan dana PIP. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Kamilah, 2020), (Oktaviani Limbong, 2023), (Septyani, 2019), (Nobriilian Sari, 2019) mengenai belum optimalnya atau belum efektifnya pengelolaan dana PIP.

Lingkungan Pengendalian

Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika, tidak ada peraturan tertulis mengenai hal ini. Misalnya pengadaan rapat dengan seluruh pengelola PIP dilakukan secara non-formal, meskipun begitu seluruh pengelola PIP hadir dalam rapat tersebut. Kemudian kepala sekolah menugaskan pengelola PIP untuk mengundang wali murid ke sekolah guna sosialisasi penggunaan dana PIP. Kesimpulannya meskipun tidak ada peraturan tertulis mengenai hal ini, pengelola tetap mematuhi semua arahan dan tugas yang diberikan kepala sekolah. Itu artinya penegakan integritas dan nilai etika pengelola PIP cukup baik.

Orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola PIP sudah sesuai dengan SOP yaitu dikelola oleh waka kesiswaan sebagai koordinatornya, kemudian menunjuk 1 orang sebagai operator dapodik yang membantu menjalankan tugas sebagai pengelola. Tetapi di sekolah ini tidak ada pelatihan untuk tim pengelola PIP agar kompeten dibidangnya. Meskipun begitu tim pengelola ini sudah menunjukkan kinerja yang baik, yang sesuai dengan prosedur. Kesimpulannya adalah tim pengelola PIP sudah komitmen terhadap kompetensi, yaitu penunjukan waka kesiswaan sebagai koordinator pengelola dan operator dapodik sebagai timnya, meskipun tidak ada pelatihan, tetapi tim sudah menunjukkan hasil yang baik.

Kepala sekolah melakukan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan selalu mendukung tercapainya penyaluran PIP yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kepala sekolah selalu hadir dalam rapat sosialisasi dari dinas dan bank mengenai pemanfaatan dan penggunaan dana PIP. Disitu kepala sekolah juga melakukan interaksi dengan kepala sekolah lainnya. Untuk hasil pelaporan mengenai dana PIP cukup bagus, karena dana PIP langsung turun ke siswa, pihak sekolah hanya membantu administrasi saja, jadi pertanggungjawabannya lebih mudah. Kesimpilannya adalah kepemimpinan yang dilakukan di sekolah ini cukup kondusif.

Struktur yang dibentuk untuk pengelolaan PIP di sekolah ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Untuk wewenangnya cukup dengan kepala sekolah sebagai pengawas dan penanggungjawab pengelolaan PIP di sekolah ini, waka kesiswaan sebagai koordinator pengelola PIP dan operator dapodik sebagai orang yang memasukkan dan mengurus data-data siswa penerima PIP pada dapodik. Untuk struktur yang dibuat tidak terlalu detail karena dana yang turun langsung ke siswa yang bersangkutan, jadi tidak perlu banyak orang untuk mengelola. Kesimpulannya adalah untuk pembentukan struktur sudah sesuai dengan kebutuhan.

Orang-orang yang ditunjuk sebagai tim pengelola PIP mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun tidak ada syarat tertentu, tetapi hal ini melekat pada kesiswaan. Kesimpulannya adalah pendelegasian wewenang dan tanggungjawab untuk tim pengelola PIP sudah tepat.

Tidak ada syarat tertentu dalam menunjuk tim pengelola PIP, namun hal ini melekat pada kesiswaan. Yang jelas orang-orang yang ditunjuk ini mampu bertanggungjawab, jujur dan amanah. Kesimpulannya adalah untuk penyusunan dan penetapan kebijakan SDM yang sehat sudah baik.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah biasanya pihak inspektorat dari BPK datang ke sekolah, waka kesiswaan sebagai koordinator pengelola akan menunjukan administrasinya, kemudian kepala sekolah akan menceritakan pengelolaan PIP yang ada di sekolah ini, pihak sekolah juga memanggil siswa penerima bantuan PIP untuk dimintai keterangan. Kesimpulannya pemerintah telah efektif dalam mewujukan peran pengawasan.

Penilaian Resiko

Resiko yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan pengelolaan dana PIP dari sekolah tidak ada resiko yang mempengaruhi. Sekarang lebih ke individu orang tua saja, bertanggungjawab atau tidak dalam menerima bantuan tersebut, karena pihak sekolah hanya mengurus administrasinya saja, tidak dengan keuangannya. Kesimpulannya adalah tidak ada resiko yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Kegiatan Pengendalian

Untuk menilai kinerja pengelola PIP tidak ada tolak ukur yang ditetapkan. Menurut kepala sekolah indikator keberhasilannya dinilai dari laporan administrasi yang bagus, tertib, penapaian distribusi, bantuan tersebut diterima oleh orang yang tepat sasaran. Kesimpulannya adalah dalam mereview kinerja pengelola PIP tidak ada tolak ukur yang ditetapkan, hanya dilihat dari pencapaian kinerja yang baik.

Pembinaan SDM secara terstruktur tidak ada, hanya skala kecil intern saja. Kepala sekolah akan memberi petunjuk bagaimana pendistribusian dana PIP. Kesimpulannya tidak ada pembinaan SDM secara terstruktur.

Pengelolaan dana PIP dari sistem informasi atau aplikasi yaitu dari aplikasi yang terinput tidak mampu akan diambil pusat dan yang akan diberi bantuan diinformasikan melalui aplikasi SIPINTAR yang menangani PIP. Dari pihak dinas dikpora ada *WhatsApp* grup yang memberitahu kapan deadline batas akhir input maupun kapan siswa yang menerima akan aktivasi, sudah cair dan dana diambil. Kesimpulannya pengelolaan dana PIP dari sistem informasi melalui aplikasi SIPINTAR dan *WhatsApp* grup.

Cara pengelola PIP melindungi aset data penerima PIP yaitu dengan cara data

dikawal dari aplikasi dapodik yang selalu diupdate minimal per semester. Kemudian yang mendapat akses masuk hanya operator dapodi saja, jadi bisa dipastikan data aman. Kesimpulannya adalah untuk pengendalian fisik aset hanya satu orang yang bisa mengakses data-data tersebut jadi bisa dipastikan aman.

Review yang dilakukan kepala sekolah untuk menilai kinerja pengelola PIP yaitu dilihat dari target distribusi. Ada beberapa tahapan usulan sampai dana cair. Dari situ dilihat bulan ini cair berapa, berikutnya cair berapa sampai seratus persen. Kesimpulannya adalah ukuran kinerja pengelola PIP dilihat dari pencapaian target distribusi.

Informasi dan Komunikasi

Sarana komunikasi yang digunakan pihak pengelola PIP untuk menunjang tercapainya tujuan yaitu melalui WhatsApp grup orang tua, kemudian untuk validasi data melalui situs internet.

Pemantauan

Pengawasan pengelolaan PIP tingkat internal dilakukan oleh kepala sekolah yang bermitra dengan komite. Kemudian untuk tingkat eksternal diawasi oleh dikpora. Dikpora ini yang mengawasi satuan-satuan kerja. Misal pencapaiannya kurang maksimal pasti ada pemberitahuan yang di kirim melalui WhatsApp, sekolah-sekolah mana saja yang target pencapaiannya kurang. Kesimpulannya adalah pemantauan dilakukan oleh kepala sekolah untuk tingkat internal dan dikpora dari tingkat eksternal.

Kesimpulan dari keseluruhan pengendalian internal pengelolaan dana PIP di SMPN 1 Maospati sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. Namun ada beberapa saran yang bisa dilakukan yaitu mengadakan pembinaan terhadap SDM pengelola PIP sebelum menjalankan wewenang sebagai pengelola atau dilakukan secara rutin dan menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja tim pengelola PIP agar bisa lebih baik lagi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Isnaini Hamidi et al., 2023), (Imaniyah, 2022), (Lumban et al., 2021) bahwa unsur pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi unsur pengendalian internal dalam pengelolaan PIP yang berlandaskan PERSEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK nomor 14 tahun 2022 dan PP nomor 60 tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan; 1) Pengelolaan PIP di SMPN 1 Maospati sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, 2) Unsur pengendalian internal yang dilakukan di SMPN 1 Maospati sudah berjalan dengan baik dilihat dari pencapaian dana

bantuan PIP yang tepat, namun ada beberapa masukan yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kinerja pengelola PIP.

Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Dari keterbatasan yang ada penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut; 1) Peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian agar bisa membandingkan pengelolaan PIP di sekolah satu dengan sekolah lainnya, 2) Peneliti selanjutnya juga bisa memperpanjang periode penelitiannya agar mendapat hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adel, Andila, Putri, 2023, *Anggaran Pendidikan Tinggi Namun Angka Putus Sekolah Justru Meningkat*, Goodstats, diakses pada 15 Januari 2023, <https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E>
- Adminplpp, 2022, Fakta PIP Mampu Turunkan Angka Putus Sekolah, [puslapdik.kemdikbud.go.id](https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/), diakses 08 Januari 2023, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/>
- Erdial. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA*. <http://e-journalpppmunsa.ac.id/index.php/ksap>
- Fakih Hilmi Al Huda, A., & Zainal Abidin, A. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)* (Vol. 17, Issue 12).
- Imaniyah, sheila. (2022). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dana Bantuan Operasional (Studi kasus MTs Al Mukarromin)*.
- Isnaini Hamidi, Muh., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2023). Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Di Kota Mataram. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 120–126. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.186>
- Kamilah, N. I. (2020). *ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI MTs BINA MADANI KOTA BOGOR*.
- Lumban, E., Atmini, S., Si, M., Akuntansi, A. J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). *EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGRI 16 URAT TIMUR*.
- Muqti, N., & Haqiqi, Y. A. (2019). *EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMP NEGERI 1 DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO*.

- Nobrilian Sari, W. (2019). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SKRIPSI*.
- Oktaviani Limbong, N. (2023). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KARTU INDONESIA*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, diakses pada 12 Februari 2024, <https://baak.politap.ac.id/perbedaan-dari-pip-dan-kip/#:~:text=Apa%20itu%20PIP%3F&text=pemberian%20bantuan%20tunai%20pendidikan%20kepada,%2C%20korban%20bencana%20alam%2Fmusibah>.
- Septyani, ane. (2019). *SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG*.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah – SPI Polimedia, spi.polimedia.ac.id/?page_id=431, diakses pada 12 Februari 2024, https://spi.polimedia.ac.id/?page_id=431
- Zed, Abidien, 2015, Wajib Belajar 12 Tahun Dimulai Tahun Ajaran Baru Ini, [tempo.com](https://nasional.tempo.co/read/703297/wajib-belajar-12-tahun-dimulai-tahun-ajaran-baru-ini), diakses pada 08 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/703297/wajib-belajar-12-tahun-dimulai-tahun-ajaran-baru-ini>